



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Website : www.bkpsdm.mubakab.go.id Telp. (0714) 321203 Fax. (0714) 322417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 89 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin harus disusun dalam suatu Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 22 Juni 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


**Drs. H. R.E. AIDIL FITRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681220 198810 1 002**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Website : www.bkpsdm.mubakab.go.id Telp. (0714) 321203 Fax. (0714) 322417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 85 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya terukur dan tepat waktu.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 272 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**
- Kesatu : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja tahun 2025.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**Drs. H. R.E. AIDIL FITRI
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19681220 198810 1 002**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2026
 Nomor : 05 /KPTS/Tahun 2025
 Tanggal : 02 -05- 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Drs. H. R.E. Aidil Fitri	Kepala BKPSDM
2.	Koordinator	Rudianto, S.T	Sekretaris BKPSDM
3.	Sekretaris	Ahmad Sodik, S.H	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
4.	Anggota	1. Elisa, S.E., M.Si	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
		2. Maria Ridha Ananda, S.E., MM	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
		3. Irfan Afriadi, S.IP., M.Si	Kabid pengembangan kompetensi aparatur aparatur
		4. M. Paisol, S.E., M.Si	Kabid Mutasi dan Promosi
		5. Verawati Oktavia, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan dan Aset
		6. Shelvianti Oktavera, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		7. Lasiman, S.H	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		8. Arina Puspita, S.H	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		9. Leni Herlina, S.E, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		10. Muhammad Nur Amin, S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		11. Sendy, S.Sos	Analisis Kepegawaian Ahli Muda

		12. Lismaniar, S.E., M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		13. Dewi Agustini, S.Kom	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		14. Mita s, S.E., M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		15. M.Paisol, S.E., M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		16. Alpian, S.H	Pengelola Barang Milik Negara
		17. Nurasia, S.H	Pengelola Program dan Laporan
		18. Nazulah, S.M	Pengelola Kepegawaian

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

**Drs. H. R.E. AIDIL FITRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681220 198810 1 002**

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, hak tersebut membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025, dimaksudkan untuk melaksanakan sasaran dan indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis 2023 – 2026 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan didukung oleh 2 program dan 12 kegiatan untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur", target kinerja ini akan menjadi komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin untuk dicapai dalam tahun 2025. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu,

2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Banyuasin, 

9



Drs. H. R.E. Aidil Fitri
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, hak tersebut membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025, dimaksudkan untuk melaksanakan sasaran dan indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis 2023 – 2026 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan didukung oleh 2 program dan 12 kegiatan untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur", target kinerja ini akan menjadi komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin untuk dicapai dalam tahun 2025. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu,

2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Banyuasin,



Drs. H. R.E. Aidil Fitri
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198810 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD	27
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran PD	32
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	52
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD	52
BAB V PENUTUP	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

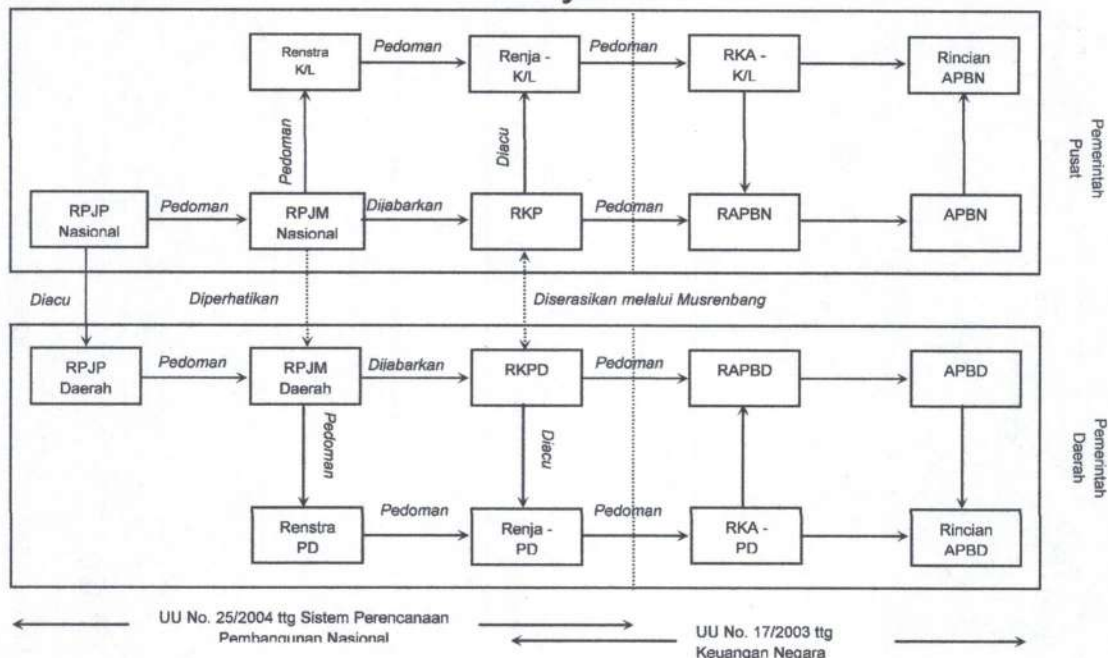
Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan, karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam setiap kinerja organisasi dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimulai dari usulan setiap Bidang dan juga dari Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian menganalisis dan menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan rencana kerja tahunan yang juga merupakan penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra PD setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) PD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD satu tahun ke depan. Dengan demikian PD dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Inpres no.7 tahun 1999 tentang SAKIP
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tetang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 272 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

1.3. Maksud dan Tujuan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna mendukung ***Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin***, BKPSDM mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur BKPSDM sehingga tugas pokok dan fungsi BKPSDM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel ;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ;

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perumahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD. Tabel T-C.29
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD. Tabel T-C.30
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024. Tabel T-C.31
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Tabel T-C.32

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran PD
- 3.3 Program dan Kegiatan. Tabel T-C.33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

- 4.1 Rencana Kerja dan pendanaan PD

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

a. Kondisi Umum BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin, dijabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja tahun ke-2 dari periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampai dengan tahun 2026 yang akan melaksanakan 2 sasaran dengan 2 program pendukung. Rata-rata capaian kinerja untuk program yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 adalah 99,77% untuk realisasi fisik dan 88,51% untuk realisasi keuangan.

Pencapaian Program Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 2 program dan 12 kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk program ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 99,67% dan realisasi keuangan sebesar 90,32%.

Program ini didukung dengan pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,98%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,54 %.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,49 %.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 74,39 %.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,11%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 9 (sembilan) sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Meterial
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,61%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,12 %.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,12 %.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Kepegawaian Daerah

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk program ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,35%.

Program ini didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

➤ Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 65,28%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 5 (lima) sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

➤ Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,40%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan :

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengelolaan Promosi ASN

➤ Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%, realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,48%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 5 (lima) sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
4. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
5. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional

➤ Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Target kinerja pada akhir Tahun 2024 untuk kegiatan ini adalah 100%,

realisasi fisik sampai dengan bulan desember tahun 2024 adalah 100% dan realisasi keuangan sebesar 80,37%.

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 6 (enam) sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
3. Pembinaan Disiplin ASN
4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
6. Evaluasi Disiplin ASN

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel T.C. 29.

Tabel T.C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrtasi Perkantoran								
5.03 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah		100	100	100	0	100	300	75
5.03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	2	2	100	2	6	1,5
5.03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	4	4	100	4	12	3
5.03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	300	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang	52	54	54	100	102	208	52
5.03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	300	75
5.03 01 2.03 01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Unit	7	7	7	100	7	21	5,25
5.03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	300	75,00
5.03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1	1	1	0	1	3	0,75
5.03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10	15	13	87	15	38	9,5
5.03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	300	75
5.03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100,00	1	3	0,75
5.03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	2	2	100,00	1	4	1
5.03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100,00	1	3	0,75
5.03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	1	1	1	100,00	1	3	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	2	2	100,00	2	6	1,5
5.03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	1	1	100,00	1	3	0,75
5.03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2	2	2	100,00	2	6	1,5
5.03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100	0	0	100	100	25
5.03 01 2.07 01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	102	10	10	100,00	8	120	30
5.03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	300	75
5.03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	100,00	1	3	0,75
5.03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	100,00	1	3	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kondisi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	100	100	100	100	300	75
5.03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7	7	7	100,00	7	21	5,25
5.03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1	1	1	100,00	1	3	0,75
5.03 01 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	30	30	30	100,00	30	90	22,5
5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	0,00	98,12	98,15	98,69	100,55	0,00	196,81	49,20
		Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Kompetensi Jabatan	0,00	84,85	85,50	90,91	106,33	0,00	175,76	43,94
		Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	0,00	99,8	99,82	99,69	99,87	0,00	199,49	49,87
		Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	0,00	1,52	1,49	0,59	39,60	0,00	2,11	0,53
		Survey Kepuasan ASN	0,00	87	87,5	87,52	100,02	0,00	174,52	43,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100%	100	100	100	100	100	300	75
5.03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	1	3	3	100,00	3	7	1,75
5.03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	1	1	1	100,00	2	4	1
5.03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	16	5	13	260,00	5	34	8,5
5.03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	4	3	4	133,33	3	11	2,75
5.03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4	4	4	100,00	4	12	3
5.03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi	100%	100	100	100	100	100	300	75
5.03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4	4	4	100,00	4	12	3
5.03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Periode	2	6	6	100,00	6	14	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	6	6	6	100,00	6	18	4,5
5.03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100	100	100	100	100	300	75
5.03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	130 Orang	6	2	2	100,00	411	419	104,75
5.03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	17	18	18	100,00	18	53	13,25
5.03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	1	3	3	100,00	1	5	1,25
5.03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	3 Dokumen	1	0	0	0,00	1	2	0,5
5.03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100	100	100	100	100	300	75
5.03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1	1	1	100,00	1	3	1
5.03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	234	300	410	136,67	300	944	236
5.03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Orang	74	57	57	100,00	60	191	47,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Orang	17	20	17	85,00	15	49	12,25
5.03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (LHKPN)	1 Laporan	1	1	1	100,00	1	3	0,75

Pencapaian Program dan Kegiatan Bulan Mei Tahun 2025

Capaian Realisasi Belanja BKPSDM

Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 sebesar Rp. 17.398.004.668,00 dan realisasi keuangan pada bulan mei tahun 2025 sebesar Rp. 3.437.692.165,00 atau 50,04% dan pencapaian realisasi fisik adalah 23,89%.

Adapun rekapitulasi pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan bulan mei tahun 2025 sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)
5.03.47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	17.398.004.668,00	49,29	5.406.988.650	31,08
1.03.5.03.47.1.03.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	11.522.396.493,00	40,08	3.365.432.032	29,21
1.03.5.03.47.1.03.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.676.000,00	49,47	10.888.000	33,32
1.03.5.03.47.1.03.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.008.000,00	40,00	5.192.000,00	20,76
1.03.5.03.47.1.03.1.02.01.02.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.968.000,00	86,00	4.240.000,00	85,35
1.03.5.03.47.1.03.1.02.01.02.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.700.000,00	70,00	1.456.000,00	53,93
1.03.5.03.47.1.03.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.238.301.152,00	41,67	2.866.377.372	31,03
1.03.5.03.47.1.03.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	9.238.301.152,00	41,67	2.866.377.372	31,03
1.03.5.03.47.1.03.1.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	46,282,500	0,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1.02.03.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	46,282,500	0,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.541.000	30,40	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1.02.05.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.536.000	100,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1.02.05.02.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	118.005,000	35,00	0,00	27,53
1.03.5.03.47.1.03.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.256.399	42,08	115.701.656	15,06
1.03.5.03.47.1.03.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	30.023.558	50,00	0,00	0,00

1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	157.297.892	35,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930	40,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799	40,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	107.040.020	35,00	6.137.600	5,73
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan Material	40.000.000	0,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	45,00	20.215.800	50,54
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	133.883.200	70,00	89.348.256	66,74
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.728.220	25,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	65.728.220	25,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.728.220	41,67	294.615.277	43,51
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	192.329.000	41,67	55.915.277	29,07
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	484.772.222	41,67	238.700.000	49,24
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.510.000	15,15	77.849.727	14,84
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	281.330.000	25,00	68.999.727	24,53
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.09.02.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	224.880.000	0,00	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.1. 02.09.02.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	18.300.000	50,00	8.850.000	48,36
1.03.5.03.47.1.03.2	Program Kepegawaian Daerah	5.875.608.175	40,70	2.041.556.618	34,75
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	548.274.050	56,28	168.092.954	30,66
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01.02.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.000.050	75,10	148.257.396	67,39
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01.02.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	197.650.000	35,15	0,00	0,00
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01.02.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.000.000	50,12	7.020.394	28,08
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01.02.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	44.625.000	48,20	6.091.500	13,65
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.01.02.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.000.000	65,30	6.723.664	11,02
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.02	Mutasi dan Promosi ASN	307.719.800	37,30	98.355.649	31,96
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.02.02.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	97.887.950	40,00	37.732.227	38,55

1.03.5.03.47.1.03.2. 02.02.02.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.081.925	38,00	22.271.100	30,47
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.02.02.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	136.749.925	35,00	38.352.322	28,05
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03	Pengembangan Kompetensi ASN	4.731.801.975	36,18	1.691.294.765	35,74
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03.02.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.799.999.700	35,00	959.271.250	34,26
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03.02.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	956.149.775	69,65	665.943.275	69,65
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03.02.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	681.777.900	6,68	45.565.240	6,68
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03.02.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	148.999.700	7,57	11.183.200	7,51
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.03.02.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	144.874.900	6,44	9.331.800	6,44
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.811.350	88,84	83.813.250	29,12
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.02	Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	51.421.500	94,00	24.734.700	48,10
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	25.120.000	56,33	1.110.000	4,42
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	58.991.850	100,00	6.249.300	10,59
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60.229.500	85,00	43.861.500	72,82
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.064.500	40,00	4.873.200	32,35
1.03.5.03.47.1.03.2. 02.04.02.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	76.984.000	100,00	2.2.984.550	3,88

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 program dengan capaian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target pada bulan mei tahun 2025 untuk program ini target fisik adalah 40,50% dan Realisasi sampai dengan bulan mei tahun 2025 adalah 40,08% sedangkan terget Keuangan adalah 36,82% dan Realisasi sampai dengan bulan mei tahun 2025 adalah 33,32%.

Program ini didukung dengan pelaksanaan 8 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

II. Program Kepegawaian Daerah

Target pada bulan mei Tahun 2025 untuk program ini target fisik adalah 36,56% dan Realisasi sampai dengan bulan mei tahun 2025 adalah 40,70% sedangkan target Keuangan adalah 30,92% dan Realisasi sampai dengan bulan mei tahun 2025 adalah 34,75%.

Program ini didukung dengan pelaksanaan 4 kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- c. Perencanaan yang meliputi segala urusan dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang Kepegawaian dan Pendidikan pelatihan;
- e. Penyusunan yang meliputi segala usaha dari kegiatan untuk melaksanakan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan, pengkoordinasian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan Pelatihan serta kursus-kursus lainnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka peningkatan kualitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga kepegawaian daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- c. Perencanaan yang meliputi segala urusan dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang Kepegawaian dan Pendidikan pelatihan;
- e. Penyusunan yang meliputi segala usaha dari kegiatan untuk melaksanakan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan, pengkoordinasian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan Pelatihan serta kursus-kursus lainnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka peningkatan kualitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga kepegawaian daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu

dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada Tabel T-C.30 yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesional ASN (IP-ASN)			-	-	78,00	79,00	60,93	77,32	78,00	79,00	
2	Indeks Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)			-	-	84,00	85,00	57,65	83,63	84,00	85,00	
3	Persentase pengisian ASN berdasarkan Formasi Kebutuhan			-	-	73,00	75,00	-	-	73,00	75,00	
4	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi			-	-	78,00	79,00	-	-	78,00	79,00	
5	Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Jabatan Fungsional			-	-	85,00	85,00	-	-	85,00	85,00	
6	Meningkatnya Kompetensi ASN			-	-	62,50	65,00	-	-	62,50	65,00	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan			98,15	98,20	98,25	-	98,69	99,21	98,25	-	
8	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan			85,50	86,50	87,50	-	90,91	78,79	87,50	-	
9	Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik			99,82	99,84	99,86	-	99,69	97,92	99,86	-	
10	Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin ASN			1,49	1,39	1,29	-	0,59	0,38	1,29	-	
11	Survey Kepuasan ASN			87,25	87,50	87,75	-	87,52	88,18	87,75	-	

*Tabel Capaian IKU OPD/IKK/SPM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informatika yang berkembang pesat dewasa ini, dapat dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Muba dalam mengaplikasikan data pegawai.

Telah tersedia aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dimana terus diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Penentuan batas usia pensiun, dan administrasi kepegawaian lainnya, guna melengkapi akuratnya data ini terutama untuk tenaga pendidikan (guru), menyangkut latar belakang tingkat pendidikan, bidang ilmu yang dimiliki dan mata pelajaran yang diasuh.

2. Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya manusia aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan terus, agar perencanaan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur lebih dapat ditingkatkan.
3. Penempatan pegawai diupayakan sesuai standar kompetensi jabatan.
4. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS, dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas

pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2025

Rancangan awal RKPD yang telah disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Muba telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Muba. Rencana Kerja BKPSDM merupakan proses penjabaran dari Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian dan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Kondisi tersebut dikategorikan sebagai instansi yang cukup berhasil dalam pencapaian kinerjanya, Review terhadap rancangan awal RKPD terdapat pada Tabel T-C.31.

Tabel T.C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEPEGAWAIAN				19.393.868.846	KEPEGAWAIAN				19.390.446.494	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	32.676.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	32.676.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.008.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.008.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.968.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.968.000	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.700.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layananan	100 %	10.025.635.552	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layananan	100 %	10.524.812.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 ASN	10.025.635.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 ASN	10.524.812.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	46.282.500	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	46.282.500	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (7 Unit)	46.282.500	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (7 Unit)	46.282.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Kepegawaian tepat Waktu	100 %	169.541.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Kepegawaian tepat Waktu	100 %	169.541.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.536.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.536.000	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	118.005.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	118.005.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	932.670.399	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	768.256.399	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.023.558	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.023.558	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	201.711.892	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	157.297.892	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.009.930	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.009.930	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.001.799	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.001.799	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	107.040.020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	107.040.020	
	Penyediaan Bahan Material	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Material	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	233.883.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	133.883.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	149.636.020	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	65.728.220	
	Pengadaan Mebel	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	149.636.020	Pengadaan Mebel	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	65.728.220	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	838.130.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	733.730.200	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	192.329.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	192.329.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	645.801.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.401.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	524.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	524.510.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	281.330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	281.330.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	224.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	224.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	18.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	18.300.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,25%	6.674.787.175	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,25%	6.524.910.175	
			Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Kompetensi Jabatan	87,50%				Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Kompetensi Jabatan	87,50%		
			Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,86%				Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,86%		
			Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,29%				Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,29%		
			Survey Kepuasan ASN	87,75%				Survey Kepuasan ASN	87,75%		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %	598.275.050	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %	548.275.050	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	270.000.050	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	220.000.050	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	197.650.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	197.650.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	44.625.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	44.625.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	61.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	61.000.000	
	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi	100 %	508.018.800	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi	100 %	408.449.800	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pelaksana, Mutasi ASN antar Daerah dan Pensiun	4 Dokumen	97.887.950	Pengelolaan Mutasi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pelaksana, Mutasi ASN antar Daerah dan Pensiun	4 Dokumen	97.887.950	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	157.650.925	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	73.081.925	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	252.479.925	Pengelolaan Promosi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	237.479.925	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.280.681.975	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.280.373.975	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	54 Orang	3.037.999.700	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	411 Orang	3.037.819.700	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	22 Orang	1.207.029.775	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	18 Orang	1.207.015.775	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	741.777.900	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	741.663.900	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	25 Orang	148.999.700	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	14 Orang	148.999.700	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	144.874.900	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	144.874.900	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	287.811.350	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	287.811.350	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	51.421.500	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	51.421.500	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	25.120.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	25.120.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	58.991.850	Pembinaan Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	58.991.850	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Laporan	60.229.500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Laporan	60.229.500	

No	Rancangan Awal RKPD-P (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Terselesainya Surat Izin Perceraian PNS	20 Dokumen	15.064.500	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Terselesainya Surat Izin Perceraian PNS	20 Dokumen	15.064.500	
	Evaluasi Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Terlaksananya Laporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN	350 Orang	76.984.000	Evaluasi Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	Terlaksananya Laporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN	350 Orang	76.984.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran didukung oleh ketentuan-ketentuan maupun arahan dari pengambil keputusan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta indikator yang telah ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi ASN baik teknis maupun fungsional
- b. Pengelolaan mutasi ASN
- c. Pengelolaan promosi ASN
- d. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- e. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
- f. Melaksanakan seleksi JPT Pratama dan jabatan Administrator
- g. Laporan penilaian kinerja ASN melalui aplikasi SAPK dan e-Kinerja
- h. Menindaklanjuti setiap pelanggaran yang telah dilakukan PNS dalam forum DP3HD
- i. Operasional SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian)
- j. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian (Simpeg)
- k. Penerimaan CPNS
- l. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
- m. Penyelesaian usul kenaikan pangkat
- n. Menindaklanjuti setiap PNS yang mengajukan izin kepegawaian
- o. Pengangkatan CPNS

- p. Penyelesaian usul penghargaan satya lencana karya satya
- q. Pelaporan harta kekayaan pejabat negara melalui aplikasi e-LHKPN
- r. Penyusunan rencana program laporan
- s. Pengadaan/perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta program pendukungnya dapat dilihat secara rinci dalam lampiran. Tujuan yang akan dicapai mengacu pada isu-isu dan analisa strategi dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun Rencana

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pencapaian sasaran diukur dengan indikator kinerja sasaran.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merencanakan 1 sasaran dengan indikator kinerja sasaran untuk dicapai pada tahun 2025. Sasaran dan indikator kinerja sasaran yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur"

- Tujuan : Meningkatkan Profesional ASN
- Indikator Kinerja :
- Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan
 - Persentase JPT yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik
 - Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN
 - Survey Kepuasan ASN

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai untuk tahun kedepan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra adalah :
"Meningkatnya Profesional ASN"

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan yang ditetapkan dalam renstra PD serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

"Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur"

- a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
- b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
- c. Evaluasi pengadaan ASN
- d. Fasilitasi Lembaga profesi ASN
- e. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
- f. Pengelolaan data kepegawaian
- g. Pengelolaan mutasi ASN
- h. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
- i. Pengelolaan promosi ASN
- j. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
- k. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- l. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
- m. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- n. Pemberian penghargaan satya lencana karya satya
- o. Pembinaan disiplin ASN
- p. Menindaklanjuti setiap PNS yang mengajukan izin kepegawaian
- q. Evaluasi disiplin ASN.

3.3 Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang rencanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebanyak 2 program, 12 Kegiatan dan 40 sub kegiatan yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Bahan / Material
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
 - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. **Mutasi dan Promosi ASN**
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Pengelolaan Promosi ASN
3. **Pengembangan Kompetensi ASN**
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
 - d. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - e. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
4. **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- b. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- f. Evaluasi Disiplin ASN

Seluruh program tersebut merupakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Sebagai perwujudan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan berdasarkan hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun berjalan maka prioritas pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 dapat di lihat pada table T.C 33 dibawah ini :

Tabel T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025
dan Prakiraan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.775.086.251,00				19.390.446.494,00
5.03	KEPEGAWAIAN				18.775.086.251,00				19.390.446.494,00
5.03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				11.480.785.701,00				12.865.536.319,00
5.03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 %	62.952.000			100 %	32676.000
5.03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	2 Dokumen	38.016.000	Pajak Daerah		2 Dokumen	25008.000
5.03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	4 Laporan	9.936.000	Pajak Daerah		4 Laporan	4968.000
5.03 01 2.01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Data	15.000.000	Pajak Daerah		1 Data	2700.000
5.03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	8.901.765.152			100 %	10.524812.000
5.03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	55 ASN	8.901.765.152	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)		102 ASN	10.524812.000
5.03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100 %	46.282.500			100 %	46282.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5.03 01 2.03 01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Dokumen (7 Unit)	46.282.500	Pajak Daerah		1 Dokumen (7 Unit)	46.282.500
5.03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian tepat Waktu		100 %	212.546.000			100 %	169.541.000
5.03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	51.536.000	Pajak Daerah		1 Paket	51.536.000
5.03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	15 Orang	161.010.000	Pajak Daerah		15 Orang	118.005.000
5.03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	938.785.127			100 %	768.256.399
5.03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	30.023.558	Pajak Daerah		1 Paket	30.023.558
5.03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	261.709.820	Pajak Daerah		1 Paket	157.297.892
5.03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	60.009.930	Pajak Daerah		1 Paket	60.009.930
5.03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	200.001.799	Pajak Daerah		1 Paket	200.001.799
5.03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	2 Paket	107.040.020	Pajak Daerah		2 Paket	107.040.020
5.03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Paket	40.000.000	Pajak Daerah		1 Paket	40.000.000
5.03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Laporan	40.000.000	Pajak Daerah		1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5.03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BKPSDM Kab. Muba	2 Laporan	200.000.000	Pajak Daerah		2 Laporan	133.883.200
5.03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100 %	109.093.700			100 %	65.728.220
5.03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	12 Unit	109.093.700	Pajak Daerah		8 Unit	65.728.220
5.03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	684.851.222			100 %	733.730.200
5.03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Laporan	192.329.000	Pajak Daerah		1 Laporan	192.329.000
5.03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	12 Laporan	492.522.222	Pajak Daerah		12 Laporan	541.401.200
5.03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100 %	524.510.000			100 %	524.510.000
5.03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	7 Unit	281.330.000	Pajak Daerah		7 Unit	281.330.000
5.03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Unit	224.880.000	Pajak Daerah		1 Unit	224.880.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5.03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor BKPSDM Kab. Muba	30 Unit	18.300.000	Pajak Daerah		30 Unit	18.300.000
5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan		98,25%	7.294.300.550			98,25%	6.524.910.175
		Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Kompetensi Jabatan		87,50%				87,50%	
		Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik		99,86%				99,86%	
		Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN		1,29%				1,29%	
		Survey Kepuasan ASN		87,75%				87,75%	
5.03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		100 %	1.030.000.000			100 %	548.275.050
5.03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kantor BKPSDM Kab. Muba	3 Dokumen	500.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		3 Dokumen	220.000.050
5.03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	2 Laporan	300.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	197.650.000
5.03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	5 Dokumen	50.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		5 Dokumen	25.000.000
5.03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kantor BKPSDM Kab. Muba	3 Lembaga	80.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		3 Lembaga	44.625.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5.03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor BKPSDM Kab. Muba	4 Dokumen	100.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		4 Dokumen	61.000.000
5.03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi		100 %	649.999.600			100 %	408.449.800
5.03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Jabatan Pelaksana, Mutasi ASN antar Daerah dan Pensiun	Kantor BKPSDM Kab. Muba	4 Dokumen	199.999.900	Dana Bagi Hasil (DBH)		4 Dokumen	97.887.950
5.03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	6 Dokumen	199.999.850	Dana Bagi Hasil (DBH)		6 Dokumen	73.081.925
5.03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	6 Dokumen	249.999.850	Dana Bagi Hasil (DBH)		6 Dokumen	237.479.925
5.03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Kompetensi ASN		100 %	5.039.998.250			100 %	5.280.373.975
5.03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kantor BKPSDM Kab. Muba	411 Orang	2.799.999.700	Dana Bagi Hasil (DBH)		411 Orang	3.037.819.700
5.03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	18 Orang	1.039.999.550	Dana Bagi Hasil (DBH)		18 Orang	1.207.015.775
5.03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kantor BKPSDM Kab. Muba	3 Dokumen	799.999.800	Dana Bagi Hasil (DBH)		3 Dokumen	741.663.900
5.03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	14 Orang	199.999.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		14 Orang	148.999.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
5.03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kantor BKPSDM Kab. Muba	2 Dokumen	199.999.800	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	144.874.900
5.03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 %	574.302.700			100 %	287.811.350
5.03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Dokumen	102.243.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	51.421.500
5.03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kantor BKPSDM Kab. Muba	200 Orang	50.240.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		200 Orang	25.120.000
5.03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kantor BKPSDM Kab. Muba	80 Orang	117.983.700	Dana Bagi Hasil (DBH)		80 Orang	58.991.850
5.03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	60 Laporan	120.459.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		60 Laporan	60.229.500
5.03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terselesainya Surat Izin Perceraian PNS	Kantor BKPSDM Kab. Muba	20 Dokumen	30.129.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		20 Dokumen	15.064.500
5.03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Laporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN	Kantor BKPSDM Kab. Muba	1 Laporan (350 Orang)	153.248.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan (350 Orang)	76.984.000
TOTAL BELANJA PERANGKAT DAERAH					18.775.086.251,00				19.390.446.494,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Rencana kerja perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Musi Banyuasin dilaksanakan dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan BKPSDM Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

KODE REKENIN G	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.251	19.390.446.494	615.360.243	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	11.480.785.701	12.865.536.319	1.384.750.618	
5.03.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.952.000	32.676.000	(30.276.000)	

5.03.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.016.000	25.008.000	(13.008.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.936.000	4.968.000	(4.968.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	2.700.000	(12.300.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.901.765.152	10.524.812.000	1.623.046.848	
5.03.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.901.765.152	10.524.812.000	1.623.046.848	Kekurangan TPP PNS Bulan ke -14, Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap I dan II Sebanyak 48 Orang
5.03.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	46.282.500	46.282.500	-	
5.03.01.2 .01.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.282.500	46.282.500	-	
5.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.546.000	169.541.000	(43.005.000)	

5.03.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.536.000	51.536.000	-	
5.03.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.010.000	118.005.000	(43.005.000)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.785.127	768.256.399	(170.528.728)	
5.03.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	30.023.558	30.023.558	-	
5.03.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.709.820	157.297.892	(104.411.928)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930	60.009.930	-	
5.03.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799	200.001.799	-	
5.03.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.040.020	107.040.020	-	
5.03.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan Material	40.000.000	40.000.000	-	
5.03.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	-	
5.03.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	133.883.200	(66.116.800)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025

5.03.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.093.700	65.728.220	(43.365.480)	
5.03.01.2 .07.02	Pengadaan Mebel	109.093.700	65.728.220	(43.365.480)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.851.222	733.730.200	48.878.978	
5.03.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.329.000	192.329.000	-	
5.03.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.522.222	541.401.200	48.878.978	Kekurangan Gaji Tenaga Honorer Bulan September – Desember Tahun 2025
5.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.510.000	524.510.000	-	
5.03.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.330.000	281.330.000	-	

5.03.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.880.000	224.880.000	-	
5.03.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.300.000	18.300.000	-	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.294.300.550	6.524.910.175	(769.390.375)	
5.03.02.2 .01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.030.000.000	548.275.050	(481.724.950)	
5.03.02.2 .01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500.000.000	220.000.050	(279.999.950)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000	197.650.000	(102.350.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80.000.000	44.625.000	(35.375.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025

5.03.02.2 .01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	61.000.000	(39.000.000)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02	Mutasi dan Promosi ASN	649.999.600	408.449.800	(241.549.800)	
5.03.02.2 .02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	199.999.900	97.887.950	(102.111.950)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.999.850	73.081.925	(126.917.925)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02.03	Pengelolaan Promosi ASN	249.999.850	237.479.925	(12.519.925)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.039.998.250	5.280.373.975	240.375.725	
5.03.02.2 .03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.799.999.700	3.037.819.700	237.820.000	Penambahan Honorarium Pansel dan Paket Pertemuan Pelaksanaan Job Fit/Selter
5.03.02.2 .03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.039.999.550	1.207.015.775	167.016.225	Penambahan Biaya Bantuan Biaya Bantuan Beasiswa Pola Pembibitan PKN STAN

5.03.02.2 .03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	799.999.800	741.663.900	(58.335.900)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	199.999.400	148.999.700	(50.999.700)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	199.999.800	144.874.900	(55.124.900)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	574.302.700	287.811.350	(286.491.350)	
5.03.02.2 .04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.243.000	51.421.500	(50.821.500)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50.240.000	25.120.000	(25.120.000)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.07	Pembinaan Disiplin ASN	117.983.700	58.991.850	(58.991.850)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120.459.000	60.229.500	(60.229.500)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025

5.03.02.2 .04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	30.129.000	15.064.500	(15.064.500)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.10	Evaluasi Disiplin ASN	153.248.000	76.984.000	(76.264.000)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Rencana kerja perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Musi Banyuasin dilaksanakan dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan BKPSDM Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

KODE REKENIN G	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.251	19.390.446.494	615.360.243	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	11.480.785.701	12.865.536.319	1.384.750.618	
5.03.01.2 .01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.952.000	32.676.000	(30.276.000)	

5.03.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.016.000	25.008.000	(13.008.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.936.000	4.968.000	(4.968.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	2.700.000	(12.300.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.901.765.152	10.524.812.000	1.623.046.848	
5.03.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.901.765.152	10.524.812.000	1.623.046.848	Kekurangan TPP PNS Bulan ke -14, Gaji dan Tunjangan PPPK Tahap I dan II Sebanyak 48 Orang
5.03.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	46.282.500	46.282.500	-	
5.03.01.2 .01.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.282.500	46.282.500	-	
5.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.546.000	169.541.000	(43.005.000)	
5.03.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	51.536.000	51.536.000	-	

	Kelengkapannya				
5.03.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.010.000	118.005.000	(43.005.000)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.785.127	768.256.399	(170.528.728)	
5.03.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	30.023.558	30.023.558	-	
5.03.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.709.820	157.297.892	(104.411.928)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930	60.009.930	-	
5.03.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799	200.001.799	-	
5.03.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.040.020	107.040.020	-	
5.03.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan Material	40.000.000	40.000.000	-	
5.03.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	-	
5.03.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	133.883.200	(66.116.800)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	109.093.700	65.728.220	(43.365.480)	

	Urusan Pemerintah Daerah				
5.03.01.2 .07.02	Pengadaan Mebel	109.093.700	65.728.220	(43.365.480)	Efesiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.851.222	733.730.200	48.878.978	
5.03.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.329.000	192.329.000	-	
5.03.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.522.222	541.401.200	48.878.978	Kekurangan Gaji Tenaga Honorer Bulan September – Desember Tahun 2025
5.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.510.000	524.510.000	-	
5.03.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.330.000	281.330.000	-	
5.03.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	224.880.000	224.880.000	-	

	Lainnya				
5.03.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.300.000	18.300.000	-	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.294.300.550	6.524.910.175	(769.390.375)	
5.03.02.2 .01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.030.000.000	548.275.050	(481.724.950)	
5.03.02.2 .01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500.000.000	220.000.050	(279.999.950)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000	197.650.000	(102.350.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80.000.000	44.625.000	(35.375.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	61.000.000	(39.000.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02	Mutasi dan Promosi ASN	649.999.600	408.449.800	(241.549.800)	

5.03.02.2 .02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	199.999.900	97.887.950	(102.111.950)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.999.850	73.081.925	(126.917.925)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .02.03	Pengelolaan Promosi ASN	249.999.850	237.479.925	(12.519.925)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.039.998.250	5.280.373.975	240.375.725	
5.03.02.2 .03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.799.999.700	3.037.819.700	237.820.000	Penambahan Honorarium Pansel dan Paket Pertemuan Pelaksanaan Job Fit/Selter
5.03.02.2 .03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.039.999.550	1.207.015.775	167.016.225	Penambahan Biaya Bantuan Biaya Bantuan Beasiswa Pola Pembibitan PKN STAN
5.03.02.2 .03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	799.999.800	741.663.900	(58.335.900)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	199.999.400	148.999.700	(50.999.700)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	199.999.800	144.874.900	(55.124.900)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	574.302.700	287.811.350	(286.491.350)	

5.03.02.2 .04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.243.000	51.421.500	(50.821.500)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50.240.000	25.120.000	(25.120.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.07	Pembinaan Disiplin ASN	117.983.700	58.991.850	(58.991.850)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120.459.000	60.229.500	(60.229.500)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	30.129.000	15.064.500	(15.064.500)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025
5.03.02.2 .04.10	Evaluasi Disiplin ASN	153.248.000	76.984.000	(76.264.000)	Efisiensi Anggaran Berdasarkan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Renja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025. Perubahan dimaksud agar dapat mengevaluasi capaian target kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan aparatur yang dinamis dan peningkatan kesejahteraan aparatur agar tercapainya tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Perubahan Renja juga merupakan tindaklanjut dari evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan merupakan upaya untuk mencapai target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dengan didukung oleh 2 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Sekayu,

2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Banyuasin,



Drs. H. R.E Aidil Fitri
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198810 1 002